

**SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2016**  
**MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN**  
**SEJARAH INDONESIA**

**BAB VIII**  
**DEMOKRASI DAN DISINTEGRASI**  
**INDONESIA 1945 - 1968**



**Dra. Sri Mastuti, P. M. Hum**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**2016**

## BAB 8

### DEMOKRASI DAN DISINTEGRASI INDONESIA 1945-1968

- A. KI : Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- B. KD : Menjelaskan makna Maklumat pemerintah tahun 1945 bagi sistem ketatanegaraan RI
- C. KKD :
- D. Materi

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan Negara, dan bertujuan untuk menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Sistem pemerintahan Negara Indonesia, menurut UUD 1945 adalah Sistem Pemerintahan Presidensial (Sistem Kabinet Presidensial), dan yang bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan adalah presiden. Presiden dibantu para menteri dan bertanggung jawab kepada presiden. Presiden merupakan Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dan juga bertanggung jawab kepada MPR.

Sistem Pemerintahan Presidensial, kemudian dirubah dengan sistem pemerintahan Parlementer. Perubahan ini diawali dengan petisi yang diajukan oleh Sutan Sjahrir, dkk, yang berisi desakan untuk merubah sistem pemerintahan menjadi Parlementer. Karena desakan tersebut, diadakannlah sidang pertama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang membahas tentang sistem pemerintahan RI dan juga badan-badan pembantunya (karena pada saat itu, belum terbentuk MPR dan DPR). Tuntutan Sjahrir, dalam sidang KNIP adalah meningkatkan fungsi KNIP sebagai badan legislatif. Sidang ini berjalan dengan sangat gaduh, tetapi dapat dihasilkan rekomendasi perluasan tugas dan wewenang KNIP, yang tercermin pada Maklumat Wakil Presiden Nomer X tanggal 16 Oktober 1945. Dan tanggal 17 Oktober 1945, diangkat ketua BP-

KNIP yaitu Syahrir dan mengesahkan sistem ketatanegaraan RI menjadi Sistem Parleментар.

Agenda kedua Sjahrir, adalah mendorong pembentukan partai-partai politik sebanyak-banyaknya, sebagai sarana penyaluran aspirasi dan paham Sistem Parleментар. Usulan tersebut mendapat persetujuan dari KNIP dan disetujui oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah No 3, tanggal 3 November 1945. Maklumat tersebut menandai terbentuknya banyak partai politik pada periode tahun November 1945 sampai Januari 1946. Pergolakan dalam penentuan Sistem pemerintah di pusat (Jakarta), dibayang-bayangi oleh keadaan sosial politik Indonesia yang masih rawan. Keinginan Belanda (NICA), yang masih ingin menguasai Indonesia menjadi tantangan tersendiri untuk kestabilan RI. Keinginan NICA tersebut, memicu serangkaian perlawanan bersenjata di berbagai tempat, berikut beberapa perlawanan di daerah.



Gambar 1: Peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato (pelajar-sejati.blogspot.com)

**Peristiwa Heroik di Surabaya**, salah satu peristiwa perlawanan di Surabaya adalah insiden bendera di Surabaya yang diawali dengan pendaratan tentara Sekutu dan NICA di Surabaya. Belanda dan

Sekutu yang mendarat di Surabaya menginginkan Hotel Yamato dijadikan markas tentara Belanda, dan bendera yang ada di atas hotel diganti dengan bendera Belanda. Tindakan Belanda tersebut, menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya, dengan gagah berani, arek-arek Surabaya menyerbu Hotel Yamato untuk menurunkan bendera Belanda. Setelah sampai di atas, bendera Belanda dirobek yang warna birunya lalu dikibarkan kembali sebagai bendera Merah Putih. Peristiwa yang lainnya adalah, tentara Sekutu telah membebaskan orang-orang Belanda yang ditahan di penjara Kalisosok. Mereka juga menduduki Pakalan Udara Tanjung Perak dan Gedung Internatio.

Melihat ulah tentara Sekutu, maka rakyat mulai mengadakan perlawanan, dalam peristiwa tersebut mengakibatkan tewasnya Brigjen Mallaby, oleh karena itu, pihak Inggris dibawah pimpinan EC. Mansergh mengeluarkan ultimatum agar tentara dan para pemuda Surabaya menyerah paling lambat pukul 06.00 pada tanggal

10 November 1945. Ternyata ultimatum dari Inggris itu dipedulikan. Sehingga Inggris naik pitam dan segera melancarkan serangan besar-besaran di Kota Surabaya. Untuk mengenang peristiwa heroik di Surabaya itu, setiap tanggal 10 November selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sebagai peringatan Kota Surabaya, maka dibangunlah Tugu Pahlawan.

**Pertempuran Ambarawa**, diawali dengan Sekutu yang ingkar janji dan menyalahi tugasnya. Tentara Sekutu bersama tentara NICA telah melakukan teror dan menindas penduduk, di Magelang. Oleh karena itu, timbullah perlawanan dari TKR dan para pejuang Para pejuang kita yang dipimpin oleh Imam Adrongi dan Letkol M. Sarbini telah melakukan perlawanan. Pada tanggal 23 November 1945, terjadilah pertempuran yang sengit antara tentara Sekutu yang didukung NICA dengan para pejuang RI.

Dalam serangan ini, Letkol Isdiman yang baru saja disertai pimpinan tempur gugur tertembak oleh pasukan musuh. Tampilah Kolonel Sudirman Panglima Devisi Banyumas untuk memimpin serangan ke Ambarawa, menggantikan Letkol Isdiman. Sudirman merencanakan untuk menggunakan taktik supit urang, untuk menyerang Sekutu. Pada tanggal 12 Desember 1945 sekitar pukul 04.30, serangan Kolonel Sudirman dilancarkan. Kota Ambarawa dikepung sehingga Sekutu terdesak dan bertahan di Benteng Willem. Oleh karena terus terdesak, pada tanggal 15 Desember 1945, Sekutu meninggalkan Ambarawa menuju Semarang. Perginya Sekutu dari Ambarawa menandai telah berakhirnya Pertempuran Ambarawa. Untuk mengenang peristiwa itu di Ambarawa didirikan Monumen Palagan Ambarawa, dan pada tanggal 15 Desember dijadikan sebagai hari Infanteri



Gambar 2: Ilustrasi Bandung Lautan Api (info-wisatadibandung.blogspot.com)

**Bandung Lautan Api**, pada tanggal 17 Agustus 1945, pasukan Sekutu memasuki Kota Bandung. Tanpa menghiraukan penduduk, pasukan Sekutu yang dibantu oleh NICA mulai menduduki daerah Bandung Utara. Pertempuran terjadi diberbagai tempat di sekitar pabrik kina di Jalan Riau, Hotel Preanger. Pada tanggal 28 November 1945, terjadi lagi pertempuran sengit di Gedung Sate. Para Pemuda membakar rumah-rumah orang Belanda, hal itu mengakibatkan tentara Sekutu naik pitam dan melancarkan serangan bom dari udara. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan

ultimatum. Sekutu memerintahkan kepada TRI dan penduduk untuk mengosongkan seluruh Kota Bandung dan mundur ke luar kota. Untuk menghindari jatuh korban, pemerintah RI menyetujui pengosongan Kota Bandung. Kota Bandung kemudian di bakar sehingga menjadi "Lautan Api". Bahkan, markas-markas TRI juga dibakar oleh anggota TRI yang akan meninggalkan tempat. Inilah pengorbanan perjuangan. Peristiwa itulah yang kita kenal dengan Bandung Lautan Api.

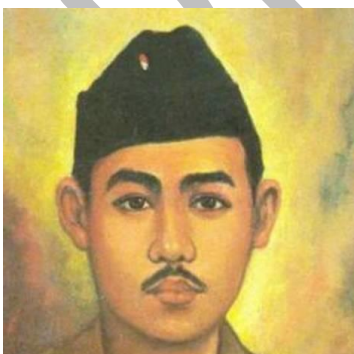
**Peristiwa Medan Area**, pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan Inggris atas nama Sekutu telah mendarat di Sumatera Utara. Pasukan Sekutu ini dipimpin oleh T.E.D. Kelly, pasukan Sekutu ini juga diikuti oleh tentara NICA. Pada awalnya kedatangan mereka disambut oleh tokoh dan masyarakat di Sumatera Utara. Akan tetapi, tindakan tentara Sekutu menyakitkan rakyat. Seorang oknum penghuni hotel menginjak-injak lencana merah putih, akibatnya, hotel diserang oleh para pemuda sehingga timbul banyak korban. Peristiwa ini menjadi awal terjadinya pertempuran Medan Area. Tentara Sekutu melancarkan aksi militer secara besar-besaran, serangan diawali pada tanggal 10 Desember 1945, rakyat pun melakukan perlawanan sekuat tenaga.

**Puputan Margarana**, Seperti daerah lainnya, rakyat Bali juga berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan dan merebut kekuasaan dari Belanda. Ternyata sejak Maret 1946, Belanda sudah menduduki beberapa tempat di Bali. I Gusti Ngurah Rai kembali ke Bali untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ngurah Rai mendapat bantuan dari TRI – Laut dengan pimpinan Kapten Markadi. Dalam perjalanan menyeberangi Selat Bali telah terjadi pertempuran laut antara pasukan Ngurah Rai dengan patroli Belanda. Pertempuran juga terjadi di Cekik dekat Gilimanuk, Bali. Ngurah Rai terus berjuang sekuat tenaga untuk mengusir Belanda, dengan melakukan *long march* dari kota satu ke kota lain, dan melancarkan serangan-serangan terhadap Belanda. Pada tanggal 18 November 1946, tentara Ngurah Rai ( yang dikenal Pasukan Cing Wanara ) mulai menyerang Tabanan dan berhasil. Belanda segera mengerahkan kekuatannya dari Bali dan Lombok, kekuatan yang tidak seimbang pasukan Ngurah Rai kemudian melakukan Perang Puputan (Pertempuran habis-habisan). Pertempuran terjadi di Margarana dan dimulai pada tanggal 20 November 1946. Dalam pertempuran tersebut, pada tanggal 29 November, Ngurah Rai gugur sebagai kusuma bangsa.

**Peristiwa Merah Putih di Minahasa**, seperti di daerah lain, rakyat Minahasa melakukan mempertahankan kemerdekaan dari tangan Belanda. Pada awal September 1945, tentara Sekutu yang diwakili tentara Australia mendarat di Minahasa. Kedatangan mereka diikuti oleh tentara NICA, dan segera melancarkan aksinya untuk menegakkan kembali kekuatannya. Sekutu dan NICA kemudian mengeluarkan perintah larangan pengibaran bendera Merah Putih, tetapi larangan tersebut tidak dihiraukan rakyat. Dengan semboyan “hidup atau mati”, rakyat Minahasa tetap akan mempertahankan berkibarnya Sang Saka Merah Putih di Tanah Minahasa. Akhirnya, bentrokan dan pertempuran antara rakyat Minahasa melawan tentara Sekutu dan NICA tidak dapat dihindarkan. Bentrokan terjadi di Tondano dan Tomohon. Pihak musuh cukup kuat karena persenjataannya lengkap. Oleh karena itu, perjuangan rakyat Minahasa dilanjutkan dengan perjuangan melalui bawah tanah.

**Pertempuran Rakyat Makassar**, pada bulan Desember 1946, Belanda mengirimkan pasukan ke Makassar di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Pasukan Westerling bertindak kejam. Pasukan Westerling banyak melakukan pembunuhan terhadap rakyat Makassar, akibatnya terjadi perlawanan rakyat Makassar kepada Belanda. Perlawanan di pimpin oleh Wolter Monginsidi, akan tetapi Wolter Monginsidi berhasil ditangkap Belanda dan kemudian dijatuhi hukuman mati.

Selain dengan kekuatan senjata, perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya juga dilakukan dengan jalan perundingan atau diplomasi.



Gambar 3 : I Gusti Ngurah Rai  
([www.biografiku.com](http://www.biografiku.com))

### **Perundingan Linggarjati**

Perang yang terjadi antara para pejuang dengan tentara sekutu yang diboncengi oleh NICA, telah menimbulkan banyak korban. Melihat kondisi tersebut para pemimpin dari kedua pihak berusaha untuk mencari jalan damai dengan melakukan perundingan. Atas dasar prakarsa Lord Killearn pada 10 November 1946 disepakati persetujuan Linggarjati (Cirebon) yang isinya :

1. Belanda mengakui secara De Facto kekuasaan RI atas Jawa, Sumatra, dan Madura.
2. Pemerintah RI dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).

3. Negara Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sutan Syahrir sedangkan Belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn, Van Poll, dan De Boer. Penandatanganan persetujuan dilakukan pada 25 Maret 1947.

### **Perundingan Renville**

Persetujuan Linggarjati merugikan bangsa Indonesia dan menimbulkan perbedaan penafsiran di antara keduanya. Sementara itu, Belanda dengan berbagai cara berusaha untuk melemahkan kekuatan Republik Indonesia. Pada 8 Desember 1947, delegasi perjanjian Renville Indonesia dipimpin PM. Amir Syarifudin, sedangkan Belanda dipimpin R. Abdulkadir Wijoyoatmojo. isi perjanjian Renville : (1) Belanda tetap berdaulat atas wilayah RI sampai kedaulatannya diserahkan kepada RIS yang segera dibentuk, (2) RIS sejajar dengan Belanda dalam Uni Indonesia – Belanda, (3) Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS, (4) Pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantong (Daerah yang berada dibelakang garis Van Mook) harus ditarik ke wilayah RI, (5) Adanya penghentian tembak-menembak disepanjang garis van mook, dan (6) Penghentian tembak-menembak diikuti dengan peletakkan senjata dan pembentukan daerah kosong militer. Perjanjian Renville menempatkan Republik Indonesia pada kedudukan yang sangat sulit. Wilayah Indonesia semakin sempit karena pendudukan Belanda. Dan dipersulit dengan adanya blokade yang dilancarkan Belanda.

### **Perjanjian Roem – Royen**

Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan Herman van Roijen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag Hasil pertemuan ini adalah: 1) Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya, 2) Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB, 3) Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, 4) Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang.



Gambar 4: Perjanjian Roem Royyen/jagosejarah.blogspot.com

### Konferensi Meja Bundar (KMB)

*Konferensi Meja Bundar (KMB)* adalah sebuah titik terang bagi bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda, menyelesaikan sengketa antara



Indonesia-Belanda, dan berusaha menjadi negara yang merdeka dari para penjajah. Konferensi Meja Bundar (KMB) dibuka secara resmi di Ridderzaal, Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949. Berikut ini adalah delegasi-delegasi yang menghadiri KMB:

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II, Delegasi UNCI dihadiri oleh Chritchley, Merle Cochran, dan Heermans, 4. Delegasi Belanda dipimpin oleh J.H. van Maarseveen.

KMB ini dipimpin oleh PM. Belanda, W. Dress dari tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November 1949. KMB ini berlangsung melalui perdebatan yang panjang. Akhirnya, setelah melalui perundingan yang berlarut-larut pada tanggal 2 November 1949 tercapailah persetujuan KMB.

Berikut ini adalah hasil persetujuan yang telah dicapai dalam KMB:

1. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.
2. Masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu satu tahun sesudah pengakuan kedaulatan.



3. Akan didirikan Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerja sama.
4. Pengembalian hak milik Belanda oleh RIS dari pemberian hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan.
5. RIS harus membayar segala utang Belanda yang diperbuatnya sejak tahun 1942.

Untuk menindaklanjuti hasil KMB maka tanggal 16 Desember 1949 Ir. Soekarno dilantik sebagai presiden RIS, dan pada tanggal 17 Desember 1949 diambil sumpahnya. Pada tanggal 20 Desember 1949, Presiden Soekarno membentuk kabinet RIS yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta sebagai perdana menterinya. Pada tanggal 23 Desember 1949, delegasi RIS yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani naskah pengakuan kedaulatan RI dari pemerintah Belanda. Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan tersebut dilakukan pada waktu yang bersamaan, baik di Indonesia maupun di Belanda yaitu pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan ditandatanganinya naskah penyerahan kedaulatan maka secara formal Belanda



Gambar 6 : Suasana multi partai, hampir 80 partai  
(www.jitunews.com)

telah mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui kedaulatan penuh negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda (kecuali Irian Barat).

### Demokrasi Liberal

Robert A. Dahl, dalam studinya yang terkenal, mengajukan lima kriteria bagi demokrasi sebagai sebuah ide politik (Robert A. Dahl, 1985). Yaitu : (1) Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga Negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif; (3) pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis; (4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat; (5) Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup orang dewasa, dalam kaitannya dengan hukum.

Dalam definisinya ini Dahl, tampak mementingkan keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan, dan adanya pengawasan terhadap kekuasaan dan dijaminnya persamaan perlakuan Negara terhadap semua warga Negara sebagai bagian dari unsure-unsur demokrasi.

Definisi demokrasi yang sejalan dengan Dahl datang dari April Carter, William Ebenstein dan Edwin Fogelman. Carter mendefinisikan demokrasi secara ringkas, padat, dan tepat sebagai “membatasi kekuasaan”. (April Carter, 1985:25) Seperti yang sudah dijelaskan diatas, pada masa demokrasi Liberal hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan, contohnya :

1. Lembaga perwakilan rakyat memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen diperlihatkan dengan sejumlah mosi tidak percaya kepada pemerintah, yang mengakibatkan cabinet harus meletakkan jabatannya. Hal ini terlihat dalam seringnya kabinet berganti-ganti, hampir satu kabinet, hanya bertahan selama kurang lebih satu tahun saja.
2. Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial.
3. Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya, untuk berkembang. Ada hampir 40 partai politik yang dibentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen, campur tangan pemerintah tidak ada sama sekali.
4. Pelaksanaan pemilu tahun 1955, dilakukan dengan prinsip demokrasi.
5. Masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga Negara dapat merasakannya dengan maksimal (Afan Gaffar,2001:30)

Pada masa demokrasi liberal dalam Indonesia, susunan kabinet yang menjalankan roda pemerintahan Indonesia, adalah sebagai berikut:

#### **KABINET NATSIR (6 September 1950 – 21 Maret 1951)**

Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950, dengan Mohammad Natsir (Masyumi) sebagai perdana menteri. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin

oleh partai Masyumi, dan juga merupakan kabinet koalisi di mana PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta, karena tidak diberi kedudukan yang sesuai. Kabinet ini pun sesungguhnya merupakan kabinet yang kuat pormasinya di mana tokoh-tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Asaat, Ir. Djuanda, dan Prof Dr. Soemitro Djojohadikusumo

Program pokok dari Kabinet Natsir adalah:

1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
3. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Keberhasilan yang pernah dicapai oleh Kabinet Natsir:

1. Di bidang ekonomi, ada **Sumitro Plan** yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional.
2. Indonesia masuk PBB
3. Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

Sementara kendala/masalah yang dihadapi selama kabinet Natsir adalah sebagai berikut:

1. Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan)
2. Pada penerapan Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit, tetapi bantuan itu diselewengkan penggunaannya sehingga tidak mencapai sasaran
3. Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS

Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRD. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

## **KABINET SUKIMAN (27 April 1951 – 3 April 1952)**

Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden, presiden menunjuk Sartono (Ketua PNI) menjadi formatur. Hampir satu bulan beliau berusaha membentuk kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Namun usahanya itu mengalami kegagalan, sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 28 hari (28Maret-18 April 1951).Presiden Soekarno kemudian menunjukan Sidik Djojokusastro ( PNI ) dan Soekiman Wijosandjojo ( Masyumi ) sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman ( Masyumi )- Soewirjo ( PNI ) yang dipimpin oleh Soekiman.

Program pokok Kabinet Sukiman adalah sebagai berikut.

1. Menjamin keamanan dan ketentraman
2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.
3. Mempercepat persiapan pemilihan umum.
4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.
5. Di bidang hukum, menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Soekiman yaitu tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Natsir hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut.

1. Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan *Mutual Security Act (MSA)*. Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatikan kepentingan Amerika. Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara

Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.

2. Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.
3. Masalah Irian barat belum juga teratasi.
4. Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan .

pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.

Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

#### **KABINET WILOPO (3 April 1952 – 3 Juni 1953)**

Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjukan Sidik Djojokusarto ( PNI ) dan Prawoto Mangkusasmito ( M asyumi ) menjadi formatur, namun gagal. Kemudian menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama dua minggu berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Mentari Wilopo, sehingga bernama kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI. Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah:

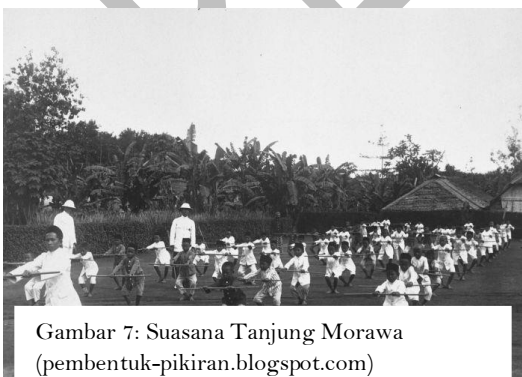
1. Program dalam negeri: (a) Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD), (b) Meningkatkan kemakmuran rakyat, (c) Meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan.
2. Program luar negeri: (a) Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, (b) Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, (c) Menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif

Kabinet ini tidak mempunyai prestasi yang bagus, justru sebaliknya banyak sekali kendala yang muncul antara lain sebagai berikut.

1. Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat.

2. Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras.
3. Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang.
4. Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952.

Peristiwa tanggal 17 Oktober 1952, merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno sehingga ia mengirim petisi mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan. Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu TNI-AD yang dipimpin Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan. Tetapi saran tersebut ditolak, dan muncullah mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD. Intiperistiwa ini adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan Sukarno agar membubarkan kabinet.



Gambar 7: Suasana Tanjung Morawa  
(pembentuk-pikiran.blogspot.com)

Selain itu, munculnya peristiwa Tanjung Morawa merupakan sebuah peristiwa penting pada masa Kabinet Wilopa. Peristiwa ini mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia, dan memiliki tanah-

tanah perkebunan. Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya, sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para

petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI, akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh. Intinya peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.

#### **KABINET ALI SASTROAMIJOYO I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)**

Kabinet keempat adalah kabinet Ali Sastroamidjojo, yang terbentuk pada tanggal 31 Juli 1953. Betapapun kabinet ini tanpa dukungan Masyumi, namun kabinet Ali ini mendapat dukungan yang cukup banyak dari berbagai partai yang diikutsertakan dalam kabinet, termasuk partai baru NU. Kabinet Ali ini dengan Wakil Perdana Menteri Mr. Wongsonegoro (partai Indonesia Raya PIR). Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I adalah:

1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.
2. Pembebasan Irian Barat secepatnya.
3. Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.
4. Penyelesaian Pertikaian politik.

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo I yaitu.

1. Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.
2. Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.
3. Konferensi Asia-Afrika I ini diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955. Konferensi dihadiri oleh 29 negara-negara Asia dan Afrika, terdiri 5 negara pengundang dan 24 negara yang diundang.

Konferensi Asia – Afrika I ini menghasikan beberapa kesepakatan yaitu : *Basic peper on Racial Discrimination* dan *basic peper on Radio Activity*. Kesepakatan yang lain terkenal dengan dasa sila Bandung, dengan terlaksananya Konferensi Asia Afrika I merupakan prestasi tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut.

1. Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.
2. Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya menteri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Bahkan ketika terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang hadir meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru.
3. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan.
4. Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
5. Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya.

Pada akhirnya NU, menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 24 Juli 1955.

#### **KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)**

Kabinet Ali selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi., sedangkan PNI membentuk oposisi. Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah:

1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru.
3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi.
4. Perjuangan pengembalian Irian Barat.
5. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.



Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu.

1. Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih *konstituante*). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi, dan menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

Tabel 1: Hasil Pemilu pertama Indonesia tahun 1955

Nama Partai	Jumlah Suara Sah	% Suara Sah	Jumlah Kursi di Parlemen	% Kursi di Parlemen
PNI	8.434.653	22.3	57	22.2
Masyumi	7.903.886	21.9	51	22.2
NU	6.955.141	18.4	45	17.5
PKI	6.176.914	16.4	39	15.2
PSII	1.091.160	2.9	8	3.1
Parkindo	1.003.325	2.6	8	3.1
Partai Katolik	770.740	2.0	6	2.3
PSI	753.191	2.0	5	1.9
Partai Murba	199.588	0.5	2	0.8
Lain-lain	4.486.701	12	30	11.7
<b>Jumlah</b>	<b>37.785.299</b>	<b>100</b>	<b>257</b>	<b>100</b>

2. Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
3. Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer.
4. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.
5. Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955, yang mana menjadi penyebab kegagalan dari kabinet Ali dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.

Kendala atau masalah yang dihadapi oleh kabinet ini adalah banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Dengan

berakhirnya pemilu, maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinetpun jatuh. Akan dibentuk kabinet baru yang harus bertanggungjawab pada parlemen yang baru pula.

#### **KABINET ALI SASTROAMIJOYO II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)**

Ali Sastroamijoyo kembali disertai mandat untuk membentuk kabinet baru pada tanggal 20 Maret 1956. Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah:

1. Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut. (a) Perjuangan pengembalian Irian Barat, (b) Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD, (c) Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, (d) Menyejahterakan perimbangan keuangan negara, dan (e) Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.
2. Pembatalan KMB.
3. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
4. Melaksanakan keputusan KAA. Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah kabinet ini mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB.

Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut.

1. Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat.
2. Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan separatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.
3. Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya.

4. Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha Nasional.
5. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.

Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

#### **KABINET DJUANDA ( 9 April 1957- 5 Juli 1959)**

Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik. Dipimpin oleh Ir. Juanda. Program pokok (Panca Karya) dari Kabinet Djuanda adalah: (1) Membentuk Dewan Nasional, (2) Normalisasi keadaan Republik Indonesia, (3) Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB, (4) Perjuangan pengembalian Irian Jaya, dan (5) Mempercepat proses Pembangunan.

Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk. Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Djuanda yaitu:

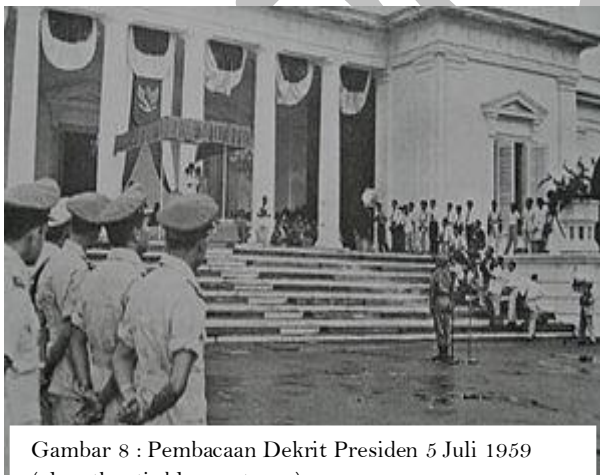
1. Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia dimana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.
2. Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin.

3. Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI.
4. Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.

Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut:

1. Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta.
2. Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya.
3. Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadiri pesta sekolah tempat putra-purinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957.

Peristiwa Cikini, menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan Negara. Kabinet Djuanda berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.



Gambar 8 : Pembacaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959  
(planetkentr.blogspot.com)

### Demokrasi Terpimpin

Sejak berakhirnya Pemilu 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidak senangnya kepada partai-partai politik. Hal ini dikarenakan, partai politik lebih mementingkan kepentingan ideologinya sendiri, dari pada kepentingan politik

Nasional. Demokrasi terpimpin merupakan kebalikan dari masa demokrasi parlementer. Demokrasi pada saat demokrasi terpimpin merupakan perwujudan dari kepentingan dan kehendak presiden sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia.

Dalam pidato pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 1956, Soekarno kemudian menguraikan tentang ide demokrasi Terpimpin yang dinamakan Manifesto

Politik, yang disingkat dengan Manipol. Manipol berisi seruan untuk dibangkitkannya kembali semangat revolusi dan perlunya dilengkapi Lembaga dan Organisasi Negara demi Revolusi. Ideologi yang saat itu masih belum jelas, ditambahkan kata Usdek, yang merupakan akronim dari UUD 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Pelaksanaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut, mendapat dukungan dari kalangan militer, Kasad Jenderal Nasution dalam perintah hariannya, menginstuksikan kepada seluruh jajaran TNI-AD untuk melaksanakan dan mengamankan Dekrit tersebut.

Hal pertama yang dilakukan Presiden Soekarno adalah, menyusun Kabinet Kerja. Kabinet Kerja I dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan mengangkat Ir. Djuanda sebagai menteri pertama. Anggota Kabinet Kerja I dilantik pada tanggal 19 Juli 1959 dengan program kerjanya yang dikenal dengan Tri Program Kabinet Kerja, yang meliputi masalah sandang dan pangan. serta keamanan dan pengambilan Irian Barat. program ini dijalankan bersama dengan program yang diuraikan Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang selanjutnya dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol). Pidato ini oleh DPAS diusulkan menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan pada akhirnya ditetapkan dalam Tap MPRS No. I/MPRS/1960 yang berintikan USDEK yaitu UUD 1945, sosialis Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan Kepribadian Indonesia.

Selain itu Presiden juga menyusun Lembaga-lembaga Negara. Pada tanggal 22 Juli 1959 keluar penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 yang menetapkan bahwa sebelum terbentuk DPR berdasarkan UUD 1945, maka DPR yang telah dibentuk berdasarkan Ulu no. 37 tahun 1953 menjalankan tugasnya sebagai DPR. Tetapi penolakan DPR terhadap RAPBN tahun 1960 mengakibatkan Presiden membubarkan lembaga tersebut berdasarkan penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960, tanggal 5 Maret 1960. Pada tanggal 24 Juni 1960 DPR diganti dengan DPR GR yang anggotanya berasal dari tiga partai besar (PNI, NU, PKI). Ketiga partai ini dianggap telah mewakili semua golongan seperti nasional, agama dan Komunis yang sesuai dengan konsep Nasakom. DPAS dipimpin oleh Presiden dan Roeslan Abdul Gani sebagai wakil ketuanya. MPRS dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 yang diketahui oleh Chaerul Shaleh, dan pada tanggal 10 November - 7 Desember 1960 mengadakan Sidang Umum pertama di Bandung. Disamping dua ketetapan di atas MPRS juga mengangkat Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi.

Dalam bidang ekonomi dipraktekkan sistem ekonomi Terpimpin, Presiden Soekarno secara langsung terjun dan mengatur perekonomian yang terpusat pada pemerintah pusat. Sistem ekonomi mengarah pada sistem ekonomi *etelisme*, yang menyebabkan menurunnya kegiatan ekonomi. Pada akhirnya keadaan perekonomian mengalami invlasi yang cukup parah. Pada akhir tahun 1965 inflasi telah mencapai 650 persen. Terjadinya inflansi dikarenakan Negara tidak dapat mengendalikan peredaran uang dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan uang, khususnya untuk mendanai pembangunan penyelenggaraan proyek mercusuar, seperti *Games of The New Emerging Forces* (Ganefo) dan *Conference of The New Emerging Forces* (Conefo)

Pada awal pelaksanaan Demokrasi terpimpin, Indonesia cukup berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan hubungan Internasional. Hal ini tampak pada kebijakan-kebijakan presiden dalam politik luar negerinya, antara lain sebagai berikut :

- Ikut ambil bagian dalam upaya perdamaian di Kongo dengan mengirimkan Misi Garuda II yang bergabung dengan pasukan perdamaian PBB yang bernama *United Nations Operation of Congo* (UNOC).
- Pada tanggal 30 September 1960, presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB yang -ienguraikan tentang Pancasila, perjuangan merebut Irian Barat, Kolonialisme, meredakan ketegangan dunia Timur dan Barat serta usaha memperbaiki orgianisasi PBB. Pidato presiden Soekarno ini berjudul *To Build The World a New* ( membangun dunia baru )
- Ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Nonblok
- Berhasil menyelenggarakan pesta olah raga bangsa-bangsa Asia (Asian Games IV) di Jakarta 24 4 September 1962.

Akan tetapi hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat semakin merenggang setelah Barat bersifat pasif dalam masalah pengembalian Irian Barat kepada Indonesia. Sebaliknya hubungan dengan negara-negara sosialis komunis erat, karena Uni Soviet bersedia memberi kredit dalam pembelian peralatan militer. Politik luar negeri bebas-aktif diganti dengan politik luar Negeri poros Jakarta - Pnom Pghen-Peking. Presiden Soekarno mempertentangkan Nefo - Oldefo Indonesia dengan negara-negara Komunis termasuk dalam Blok Nefo (*New Emerging Forces*) terdiri dari negara-negara Eropa Barat, Inggris dar Amerika Serikat. Sebagai bagian terhadap aksi menentang oldefo-Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan pemerintah tidak setuju

dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap membahayakan eksistensi Indonesia dan negara-negara Blok Nefo.

Dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat (DWIKORA) pada tanggal 3 Mei 1964 yang isinya sebagai berikut :

1. Perhebat Ketahanan revolusi Indonesia
2. Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Malaysia

Pelaksanaan Dwikora diawali dengan pembentukan Siaga di bawah pimpinan Marsdek Omar Dahi, yang bertugas mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timur dan Barat. Hal ini menunjukkan adanya campur tangan Indonesia terhadap masalah-masalah negeri Malaysia. Terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pukulan berat bagi Indonesia sehingga PBB dianggap telah dikuasai oleh kekuatan Blok Aldefo, dan pada tanggal 7 Januari 1965 Indonesia menyatakan ke luar dari keanggotaan PBB. Aksi upaya damai untuk mengakhiri konfrontasi Indonesia - Malaysia dilakukan dengan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tiga negara, meliputi Indonesia, Filipina dan Malaysia di Tokyo, tetapi tidak memperoleh kesepakatan.

Kegiatan lainnya dalam Politik Luar Negeri Indonesia, pada masa Demokrasi Terpimpin, adalah dibentuknya Poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking (Beijing), dan Pyong Yang sebagai poros dari Negara-Negara anti imperialisme dan kolonialisme. Politik poros ini, menimbulkan dampak bagi Indonesia, yaitu, ruang gerak diplomasi di forum internasional menjadi sempit, terjadi penyimpangan secara prinsipil dari dasar-dasar politik luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif, dan memasukkan Indonesia ke dalam lingkungan strategis politik Tiongkok. Kedekatan dengan Tiongkok, melalui persekutuan Jakarta-Tiongkok diresmikan pada bulan Januari 1965 saat Subandrio sebagai menteri Luar Negeri mengadakan kunjungan ke China. Perdana Menteri Zhou Enlai sempat menawarkan persenjataan untuk mempersenjatai milisi rakyat, sebagai kekuatan baru, yang mungkin dapat diorganisasi oleh PKI. Hal ini pula yang membuat Aidit, mengusulkan kepada Soekarno agar dibentuk angkatan kelima, yang terdiri dari golongan buruh dan tani yang dipersenjatai. Hal ini tentu saja, mendapat tantangan dari pihak Angkatan Darat. Pada tanggal 27 September 1965, Jenderal Ahmad Yani akhirnya mengumumkan bahwa AD menentang pembentukan Angkatan kelima. Puncak peristiwa yang kemudian akan

mengubah konstelasi politik Indonesia, selanjutnya adalah peristiwa terjadinya percobaan kudeta di Jakarta, Gerakan 30 September 1965.

### **Pemberontakan antara tahun 1945-1965**

Pemberontakan di dalam Negeri terjadi karena dipicu oleh beberapa masalah berikut : (1) Keinginan untuk mendirikan Negara sendiri yang lepas dari RI, (2) Mempertahankan Negara agar tetap berbentuk Negara Federal, (3) Keengganan APRIS di Negara Bagian, bergabung dengan TNI dan menolak kebijakan pemerintahan Hatta untuk melakukan Reorganisasi dan Rasionalisasi dalam tubuh militer yang menekankan profesionalisme. Berikut ini diuraikan satu persatu tentang pemberontakan yang membahayakan integrasi bangsa dari Indonesia merdeka tahun 1945-1965.

### **PKI MADIUN 1948**

Pada awal Januari 1948 Kabinet Amir Syarifudin dibubarkan. Presiden Sukarno menunjuk Muhammad Hatta untuk mengatur susunan kabinet baru. Namun Muhammad Hatta menyusun kabinet tanpa memasukkan seorangpun menteri dari golongan kiri (sosialis-komunis). Pada bulan Agustus 1948 Musso, salah seorang tokoh pendiri PKI kembali dari Moskow. Ia bermukim di Moskow sejak tahun 1926. Kembalinya Musso ke Indonesia membuat kebijakan baru bagi PKI. Kebijakan ini sering disebut jalan baru Musso. Kebijakan Musso selanjutnya adalah menentang susunan kabinet Muhammad Hatta yang menurutnya telah menjual negara kepada imperialis Belanda. Pertentangan politik ini berubah menjadi insiden bersenjata. Front Demokrasi Rakyat (FDR) bentukan PKI semakin meningkatkan kegiatan pengacauan. Di Solo misalnya, terjadi pemberontakan antara FDR/PKI dengan lawan-lawan politiknya dan bahkan dengan TNI. Puncaknya adalah ketika PKI mengambil alih kekuasaan di Madiun. FDR/PKI lalu memproklamasikan berdirinya Negara Sovyet Indonesia pada 18 September 1948. Selain di Madiun, PKI juga berhasil menguasai Pati, Jawa Tengah.

Di Pati PKI juga membentuk pemerintahan baru. Sementara itu Musso menyerang pemerintah dan mengatakan bahwa Sukarno-Hatta telah menjalankan politik kapitulasi kepada Inggris dan Belanda dan memprovokasikan bahwa negara tengah dijual kepada kapitalis. Pemerintah segera mengambil tindakan untuk menumpas pemberontakan PKI dengan melancarkan Operasi Militer I yang dipimpin oleh Kolonel



Abdul Haris Nasution. Pada tanggal 30 September 1948 Madiun berhasil direbut kembali oleh TNI. Dalam operasi itu, Musso berhasil ditembak mati, sementara Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

### **DI/TII**

Pendirian Negara Islam Indonesia ( NII ) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949. NII atau juga dikenal sebagai Darul Islam yang artinya Rumah Islam diproklamasikan di Cisampah, Ciawiligar Tasikmalaya dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya dikatakan bahwa " Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam ". Lebih jelas lagi dalam Undang - Undangnya dinyatakan bahwa Negara Berdasarkan Islam dan Hukum yang tertinggi adalah Al Qur'an dan Hadits. Proklamasi Negara Islam Indonesia menyatakan kewajiban negara untuk memproduksi Undang-undang yang berlandaskan syari'at Islam dan penolakan keras terhadap ideologi selain Al Qur'an dan Hadits Shahih yang mereka sebut " Hukum Kafir " sesuai dalam Qur'an Surah 5 Al-Maidah, ayat 145. NII atau DI dalam perkembangannya menyebar kebeberapa wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Aceh. Setelah SM Kartosoewirjo ditangkap dan dieksekusi oleh TNI pada tahun 1962, gerakan ini terpecah namun tetap eksis secara diam-diam dan dianggap sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah Indonesia.

### **APRA ( Angkatan Perang Ratu Adil )**

Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling bekas tentara KNIL, tujuannya agar pemerintah RIS dan Negara Pasundan mengakui APRA sebagai tentara negara Pasundan dan agar negara Pasundan tidak dibubarkan/dilebur ke dalam NKRI. Aksi Westerling dimulai pada tanggal 12 Desember 1946, dengan melakukan penggeledahan rumah-rumah penduduk, dengan alasan mencari pemberontak dan mengancam rakyat untuk tidak melakukan perlawanan. Aksi ini menewaskan banyak korban, dan berdasarkan laporan delegasi Indonesia untuk PBB, tercatat korban jiwa mencapai 20.00-40.00 jiwa. Ketika Westerling melakukan pembantaian, ada seorang pemuda yang bernama Robert Wolter Monginsidi yang berani melakukan perlawanan dengan cara gerilya melawan pasukan khusus Westerling.

### **ANDI AZIS**

Pemberontakan Andi Azis di Makassar, 5 April 1950. Pemberontakan ini bermula saat Dr. Soumoukil bersikeras untuk mendirikan atau mempertahankan Negara Indonesia Timur. Pemerintah kemudian mengirimkan Batalyon Worang untuk menumpas gerakan tersebut, rupanya kedatangan batayon Worang tersebut membuat Dr. Soumoukil khawatir dan menghasut Kapten Andi Azis untuk melakukan pemberontakan. Pemberontakan tersebut meletus pada 5 April 1950 di Sulawesi Selatan dengan dipimpin oleh Kapten Andi Azis, yang merupakan mantan tentara Koninklijk Nederlands Indisch Leger ( KNIL ). Kapten Andi Azis bersama pasukannya menyerang pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ( APRIS ) dan menawan Pejabat Panglima Tentara Territorium Indonesia Timur, Letnan Kolonel Mokoginta beserta staffnya, sehingga kota Makassar bisa mereka kuasai. Untuk menguasai keadaan ini, pemerintah pusat pada tanggal 7 April 1950 mengirimkan pasukan TNI dibawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang dan mengultimatum Andi Azis agar segera menyerah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, tapi Andi



Gambar 9 : Robert Wolter Monginsidi (id.wikipedia.org)

Azis menolak sehingga terjadi beberapa kali pertempuran. Pada tanggal 8 Agustus 1950 akhirnya ditandatangani persetujuan gencatan senjata antara kedua belah pihak, sehingga kota Makassar bisa dikuasai kembali dan pada 8 April 1953, Andi Azis dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun potong masa tahanan.

### **Republik Maluku Selatan ( RMS )**

Pemberontakan Republik Maluku Selatan ( RMS ) di Maluku, pada 25 April 1950 di Ambon dengan tokoh pemberontak adalah Mr. Dr. Soumoukil. Pada tanggal tersebut di Ambon diproklamasikan berdirinya Republik Indonesia Maluku Selatan/ RMS dan menyatakan diri lepas dari Republik Indonesia Serikat oleh Dr. Soumoukil, bekas Menteri Kehakiman Negara Indonesia Timur. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, Kolonel Kawilarang menyerang hingga ke Kepulauan Buru yang dikuasai pemberontak hingga ke Pulau Seram bagian Utara. Serangan terhadap Pulau Ambon sendiri dilaksanakan pada 28 September 1950, dan dalam pertempuran tersebut benteng Victoria dapat direbut pasukan TNI pada 6 November 1950, sehingga pemberontakan RMS bisa digagalkan.

## **PRRI/Permesta**

Pemberontakan PRRI/Permesta, pada tahun 1958. Penyebabnya adalah adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah. Tidak meratanya pembangunan serta semakin melebarnya gerakan komunisme menjadi dasar bagi pemerintah daerah di Sumatera dan Sulawesi Utara untuk mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta atau lebih dikenal sebagai PRRI/Permesta. Di Sumatera, para pemimpin PRRI seperti Dr. Syafruddin Prawiranegara, Dahlan Djambek, Soemitro Djojohadikoesoemo dll, melakukan pemberontakan sebagai koreksi atas kebijakan pemerintah pusat. Sementara di Sulawesi Utara, Permesta melakukan pemberontakan dengan ditunggangi kepentingan negara asing, dalam hal ini adalah Amerika Serikat, terbukti dengan ditembak jatuh pesawat AS yang dipiloti oleh penerbang Amerika bernama Pope.

## **Gerakan 30 September 1965**

Peristiwa G30S baru dimulai pada tanggal 1 Oktober pagi, dimana kelompok pasukan bergerak dari Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma menuju daerah selatan Jakarta untuk menculik 7 jenderal yang semuanya merupakan anggota dari staf tentara. Tiga dari seluruh korban yang direncanakan, mereka bunuh di rumah mereka yaitu Ahmad Yani, M.T. Haryono, dan D.I. Panjaitan. Ketiga target lain yaitu Soeprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap hidup-hidup, sementara target utama mereka, Jendral Abdul Harris Nasution berhasil kabur setelah melompati dinding yang berbatasan dengan taman di kedutaan besar Iraq. Meski begitu, Pierre Tendean yang menjadi ajudan pribadinya ditangkap, dan anak putrinya yang berusia lima tahun, Ade Irma Suryani Nasution, tertembak oleh regu sergap dan tewas pada 6 Oktober. Korban tewas bertambah ketika regu penculik menembak dan membunuh seorang polisi yang menjadi penjaga rumah tetangga Nasution, Karel Satsuit Tubun. Korban tewas terakhir adalah Albert Naiborhu, keponakan dari Pandjaitan, yang tewas saat menyerang rumah jenderal tersebut. Mayat dan jenderal yang masih hidup kemudian dibawa ke Lubang Buaya, dan semua dibunuh serta mayatnya dibuang di sumur dekat markas tersebut.

G30S baru berakhir ketika pada pukul 7 malam, pasukan yang dipimpin oleh Soeharto berhasil mengambil kembali kontrol atas semua fasilitas yang sebelumnya direbut oleh Gerakan 30 September. Ketika sudah berkumpul bersama Nasution, pada pukul 9 malam Soeharto mengumumkan bahwa ia sekarang mengambil alih tentara dan

akan berusaha menghancurkan pasukan kontra-revolusioner dan menyelamatkan Soekarno. Ia kemudian melayangkan ultimatum lagi yang kali ini ditujukan kepada pasukan yang berada di Halim. Tidak berapa lama, Soekarno meninggalkan Halim dan tiba di istana presiden lainnya yang berada di Bogor. Untuk jasad ke-7 orang yang terbunuh dan dibuang di Lubang Buaya sendiri baru ditemukan pada tanggal 3 Oktober, dan dikuburkan secara layak pada tanggal 5 Oktober. Para pemimpin PKI kemudian dikumpulkan, beberapa dari mereka, termasuk Aidit, langsung dieksekusi. Lainnya diadili, banyak lainnya dieksekusi. Tentara pun menguasai media dan mengorganisir pemakaman dramatis dari para perwira yang terbunuh, menyulut api kemarahan terhadap PKI. Beberapa minggu sesudahnya, setelah tentara mendapat kepastian kekuasaan, pembunuhan mulai terjadi. Dalam empat bulan saja, 500 ribu orang tewas. Peristiwa Gerakan 30 September, kemudian mengakhiri kekuasaan Soekarno dan sekaligus menandai berakhirnya Demokrasi Terpimpin di Indonesia.

#### Daftar Pustaka

April Carter. 1985. *Otoritas dan Demokrasi*, Terjemahan: Sahat Simamora. Jakarta. Rajawali Press

Afan Gaffar. 2001. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Horowitz, Donald L. 2014. *Perubahan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Kardiyat. Wiharyanto. 2011. *Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*. Yogyakarta. Univ Sanata Darma

Robert A. Dahl. 1985. *Democracy and Its Critics*. New York. Yale University Press